



PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI, SARANA DAN PRASARANA DESA PELIMPAAN KAB.SAMBAS

Lita Hastuty¹⁾, Etika damayanti²⁾, Haikal Aprilianza³⁾, Suyanti⁴⁾, Suryadi Mikael⁵⁾, Mathilda Sunta⁶⁾, Ritaudin⁷⁾, Rachmah Bayu Safitri⁸⁾, Hery Sukriadi⁹⁾, Abang Indriyadi¹⁰⁾, Yulius Yohanes¹¹⁾, Sri Haryaningsih¹²⁾

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Ilmu Administrasi Program Magister Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Corresponding Email: indriyadiptk@gmail.com

Abstrak:

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas administrasi pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat dalam penataan sarana dan prasarana di Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Permasalahan yang dihadapi meliputi belum optimalnya tata kelola administrasi desa, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi lokal, serta kurangnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, ceramah, observasi lapangan, dan pendekatan partisipatif melalui dialog serta penampungan aspirasi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan sasaran aparatur desa, anggota PKK, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai administrasi desa, peran PKK dalam pemberdayaan keluarga, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana. Selain itu, kegiatan kerja bakti dan rehabilitasi ringan fasilitas desa memperkuat semangat gotong royong masyarakat. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran administrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, administrasi desa, sarana prasarana, partisipasi, tata kelola desa

Abstrack:

This community service program aimed to enhance village administrative capacity and community empowerment in managing infrastructure in Pelimpaan Village, Jawai District, Sambas Regency. The identified problems included suboptimal village administrative governance, limited public understanding of local economic management, and weak institutional roles in village development. The methods used were socialization, lectures, field observations, and participatory approaches through dialogue and aspiration forums. The program was conducted for three days involving village officials, PKK members, and the community. The



results indicated increased understanding of village administration, the role of PKK in family empowerment, and community participation in infrastructure development. Community service activities such as mutual cooperation and light rehabilitation of village facilities strengthened collective awareness. Overall, the program positively impacted administrative awareness and community participation in village development.

Keywords: *Community empowerment, village administration, infrastructure, participation, governance*

Pendahuluan

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tata kelola administrasi yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, berdasarkan observasi di Desa Pelimpaan, masih ditemukan kendala dalam penyelenggaraan administrasi desa serta penataan sarana dan prasarana pemerintahan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa belum optimal. Peran lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang Taruna perlu diperkuat agar mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, kegiatan PPM ini bertujuan meningkatkan kapasitas administrasi desa serta memberdayakan masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana desa.

Kajian Teori

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Suharto, 2014). Dalam konteks desa, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan penguatan ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal dan pengelolaan aset desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan. Dengan demikian, penguatan administrasi desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pendekatan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan ceramah untuk menyampaikan materi mengenai administrasi desa, peran PKK dalam pemberdayaan keluarga, serta pengelolaan ekonomi lokal. Selain itu, dilakukan observasi lapangan guna mengidentifikasi secara langsung kondisi sarana dan prasarana desa sebagai dasar dalam perumusan langkah perbaikan. Pendekatan dialogis juga diterapkan melalui penampungan aspirasi masyarakat agar kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dapat diakomodasi secara partisipatif. Sebagai bentuk keterlibatan langsung masyarakat, kegiatan kerja bakti dilaksanakan untuk mendukung penataan sarana desa. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6–8 Februari 2026 di Balai Desa Pelimpaan dengan jumlah peserta sekitar 30 orang yang terdiri dari aparatur desa, anggota PKK dan masyarakat setempat.

Hasil Dan Pembahasan

Profil Desa Pelimpaan dan Kondisi Awal

Desa Pelimpaan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan luas wilayah 1.371,28 Ha dan jumlah penduduk 3.312 jiwa. Struktur mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, dengan jumlah petani mencapai lebih dari 1.400 orang. Secara administratif, desa telah memiliki perangkat pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang aktif, namun pengelolaan administrasi desa masih belum sepenuhnya optimal.



Gambar 1. Kantor Desa Pelimpaan
Sumber Gambar Dokumentasi Penulis,2026

Hasil observasi awal menunjukkan beberapa persoalan utama, yaitu belum tertibnya administrasi pelayanan publik, kurangnya optimalisasi peran PKK dalam pemberdayaan keluarga, serta masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi lokal dan pemeliharaan sarana prasarana desa. Selain itu, beberapa fasilitas fisik seperti plang nama kantor desa dan ruang publik belum tertata secara representatif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya manusia dan kapasitas tata kelola administrasi desa. Oleh karena itu, intervensi berbasis partisipatif menjadi strategi yang dipilih untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesadaran kolektif masyarakat.

Tabel 1. Profil Demografis Desa Pelimpaan

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Jumlah Penduduk | 3.312 jiwa |
| Jumlah Kepala Keluarga | 1.030 KK |
| Luas Wilayah | 1.371,28 Ha |
| Mata Pencarian Dominan | Pertanian dan Perkebunan |

Sumber: Data Profil Desa Pelimpaan, 2026

Pelaksanaan Sosialisasi Administrasi Desa dan Peran PKK

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Pelimpaan dengan melibatkan sekitar 30 peserta yang terdiri dari aparatur desa, anggota PKK, dan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya tertib administrasi desa, transparansi pengelolaan dana desa, serta penguatan peran PKK.

Tabel 2. Rekapitulasi Peserta Sosialisasi

| | |
|---------------|----|
| Aparatur Desa | 10 |
| Anggota PKK | 10 |
| Masyarakat | 10 |
| Total | 30 |

Sumber: Hasil Kegiatan PPM, 2026



Gambar 2. Sosialisasi Administrasi
Sumber Gambar Dokumentasi Penulis,2026

Penataan Sarana dan Prasarana Desa

Kegiatan fisik yang dilakukan berupa rehabilitasi ringan plang nama kantor desa serta kerja bakti lingkungan. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap aset publik serta meningkatkan kualitas lingkungan desa.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

| Kegiatan | Jumlah Terlibat | Persentase |
|-------------|-----------------|------------|
| Sosialisasi | 30 | 100% |
| Kerja Bakti | 25 | 83% |

Sumber: Dokumentasi dan Observasi Lapangan, 2026



Gambar 3. Penataan Sarana dan Prasarana Desa
Sumber Gambar Dokumentasi Penulis,2026



Simpulan

Program pengabdian kepada masyarakat di Desa Pelimpaan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya tata kelola administrasi dan partisipasi dalam penataan sarana prasarana. Kegiatan sosialisasi dan kerja bakti mendorong kesadaran kolektif serta memperkuat peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa. Meskipun terdapat keterbatasan waktu pelaksanaan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas administrasi desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Agustina, I. D. (2024). Peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga: studi kasus dan implikasi. *Etnoreflika Journal*.
- Arbayah, S. (2022). Level of community participation in planning village development: Case study of Banjaran village. *PUBBIS Journal*.
- Fitriyani, F. (2024). The role of the village government in empowering farming communities for village economic development: A qualitative study. *Golden Ratio Journal*.
- Ginting, A. H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura: revenues, expenditure and governance challenges. *Cogent Social Sciences*.
- Hayati, S. N. (2025). Implementing the principle of good governance in villages: Challenges of aparatur desa capacity in financial management. *Malā (Journal of Public Administration)*.
- Kusumastuti, R., Erwin, H., & Karina, M. (2025). Community empowerment utilizing open innovation as a sustainable village-owned enterprise strategy in Indonesia: A systematic literature review. *Journal of Community Development*.
- Lisdahayati, L. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok PKK: Pendekatan partisipatif untuk pengendalian hipertensi dan promosi kesehatan. *JPbM: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.



- Mawadzah, A. (2023). Partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat plus (Prodamas Plus) dalam pembangunan daerah. *Janitra: Jurnal Pengabdian*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (2019). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447*.
- Rochmiyati, dkk. (2023). Community empowerment based on local wisdom. *Image: Jurnal Pendidikan & Pemberdayaan*.
- Rosidin. (2019/2024). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang aspiratif. *Aliansi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. (diakses online 2024).
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. *Refika Aditama*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*.
- Utomo, H. (2024). Introduction: The management of village funds in Indonesia and implications for rural development. *Jurnal Administrasi & Pembangunan Daerah*.